



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
PADANG PANJANG**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Renja BPBD KESBANGPOL.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2018-2023.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD KESBANGPOL.....	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPBD KESBANGPOL.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN BPBD KESBANGPOL.....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KESBANGPOL.....	65
BAB V PENUTUP.....	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang.....	11
TABEL 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024.....	26
TABEL 2.3 Pencapaian Kinerja BPBD KESBANGPOL Padang Panjang.....	32
TABEL 2.4 Pemetaan Permasalahan.....	36
TABEL 2.5 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	39
TABEL 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan Renja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	41
TABEL 3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	47
TABEL 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang 2025.....	50
TABEL 3.3 Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BPBD KESBANGPOL Sumbar Tahun 2021-2026.....	55
TABEL 3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	57
TABEL 3.5 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang.....	60
TABEL 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja BPBD KESBANGPOL) Tahun 2025.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Tahapan Penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL.....	6
GAMBAR 1.2 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah	6
GAMBAR 2.1 Pohon Masalah BPBD, KESBANGPOL Padang Panjang.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD, KESBANGPOL) Tahun 2025

didasarkan pada Renstra BPBD, KESBANGPOL 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD, KESBANGPOL serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu “Terwujudnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Agamis”.

Penyusunan Renja BPBD, KESBANGPOL dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja BPBD, KESBANGPOL meliputi :

Pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renja BPBD KESBANGPOL penyusunan agenda kerja tim penyusun dan penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD;

2. Penyusunan rancangan awal Renja BPBD, KESBANGPOL

Penyusunan rancangan awal Renja BPBD, KESBANGPOL berpedoman pada Renstra BPBD KESBANGPOL, hasil evaluasi Renja BPBD, KESBANGPOL tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja BPBD, KESBANGPOL tahun 2024. Selanjutnya penyusunan rancangan awal Renja BPBD, KESBANGPOL mencakup :

- a. Analisa gambaran pelayanan BPBD, KESBANGPOL; dan
- b. Hasil evaluasi Renja BPBD, KESBANGPOL Tahun 2023.

3. Penyusunan rancangan Renja BPBD, KESBANGPOL

Penyempurnaan rancangan Renja BPBD, Kesbangpol dilakukan berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan setelah verifikasi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini menjamin rancangan Renja BPBD, KESBANGPOL selaras dengan rancangan awal RKPD dan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

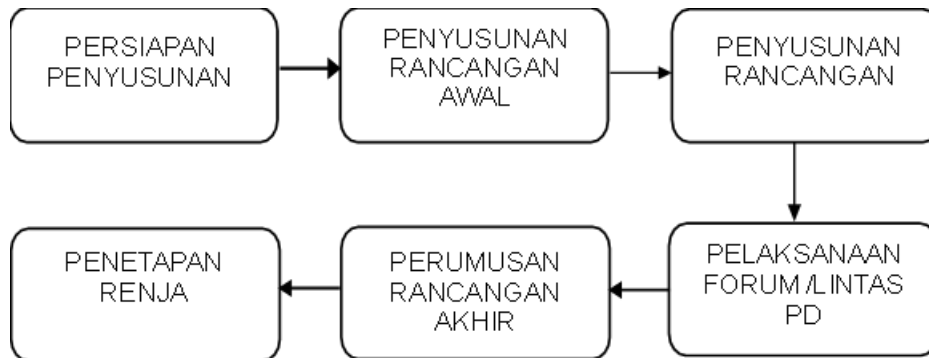
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

5. Perumusan rancangan akhir Renja BPBD, KESBANGPOL;

Rancangan akhir Renja BPBD, KESBANGPOL disajikan dengan sistematika yang telah ditetapkan;

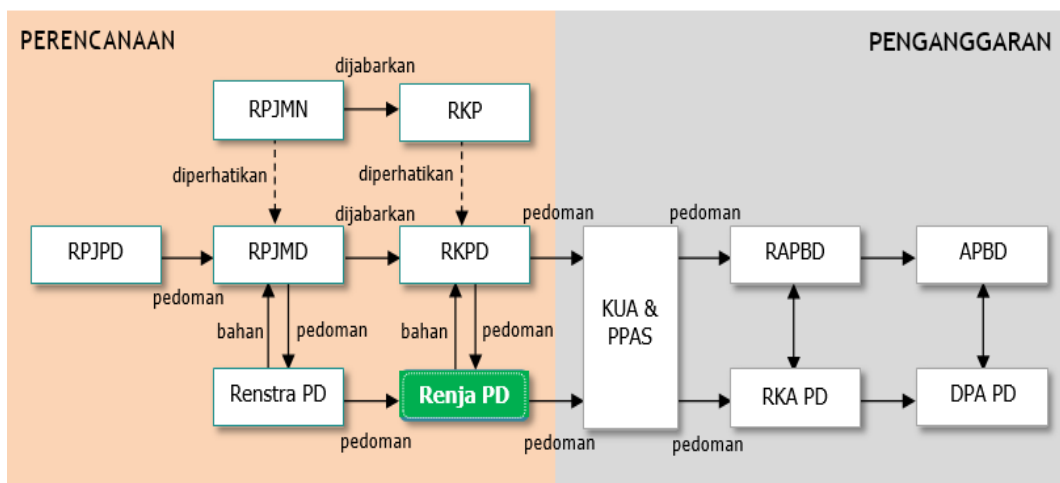
6. Penetapan Renja BPBD, KESBANGPOL.

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL
Kota Padang Panjang



Renja BPBD KESBANGPOL adalah penjabaran dari Renstra BPBD, KESBANGPOL 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 194)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7.)
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan BPBD KESBANGPOL melalui program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai salah satu bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD KESBANGPOL Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPBD KESBANGPOL disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD KESBANGPOL TAHUN 2023

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2018-2023, Analisis kinerja pelayanan BPBD KESBANGPOL, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD KESBANGPOL review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KESBANGPOL

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja BPBD KESBANGPOL serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KESBANGPOL

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2018-2023

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2022 dan 2023 terhadap target kinerja pada Perubahan Renstra tahun 2018-2023. Evaluasi juga dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2024-2026.

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra BPBD KESBANGPOL tahun 2024-2026 tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD KESBANGPOL Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(berdasarkan Perubahan Renstra 2018-2023)

Nama Perangkat Daerah: BPBD KESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERUBAHAN REANSTRA 2018-2023									
3 1	PENUNJANG URUSAN									
3 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	98,00%	98,77%	100,79%			
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	94,00%	98,88%	105,19%			
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	32 org	32 org	32 orang	32 orang	100%			
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%			
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%			
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%			
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	11 unit	11 Unit	4 Unit	4 Unit	100%			
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%			
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%			
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 Laporan	7 laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%			
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	20 unit	20 Unit	20 Unit	100%			
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	33 Unit	33 unit	33 Unit	33 Unit	100%			
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-			
	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kasawan Tempat Tinggal	160 org	160 org	160 org	160 org	100%			
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 org	22 org	22 org	22 org	100%			
	Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Kejadian yang tertangani	85 kali	85 kali	85 kali	85 kali	100%			
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peserta Jambore Tk Provinsi	15 org	-	-	-	-			
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pasca bencana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %			
	Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Kejadian yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik ,Peningkatan Demokrasi ,fasilitasi Kelembagaan kegiatan ,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%			
	Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang dapat Bantuan Keuangan	8 Partai	8 Partai	8 Partai	8 Partai	100%			
	Program pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial Dan Budaya	Persentase pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial Dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Pertemuan yang di adakan	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realissi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah									
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Poitik bagi Pemilih Pemula		-	-	-	-	-			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presntase Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%			
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Presntase Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100%			

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(berdasarkan Renstra 2024-2026)**

5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	90 Persen					90 Persen	90 Persen	100%
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 orang/bulan					518 orang/bulan	518 orang/bulan	100%
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 paket					35 paket	35 paket	100%
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen					90 Persen	90 Persen	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket					4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket					4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket					12 Paket	12 Paket	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan					34 Laporan	34 Laporan	100%
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen					100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.07 0004	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit					4 Unit	4 Unit	
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	20 Unit					20 Unit	20 Unit	100%

5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen						90 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan						12 laporan	12 laporan	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen						90 Persen	90 Persen	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
5 01 02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
5 01 02 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
5 01 02 2.01 0002	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 01 02 2.01 0005	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara yang mengikuti sosialisasi KIE termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	100%

5 01 02 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kesiapan Masyarakat terhadap resiko bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	86 Persen	100%
5 01 02 2.02 0001	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		1 Unit	100%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	105 Unit	105 Unit	105 Unit	105 Unit	105 Unit	105 Unit	105 Unit	100%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	320 Orang	100%
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana						22 orang		
5 01 02 2.03 0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5 01 02 2.04	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5 01 02 2.04 0001	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	0
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	100%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
5 01 03	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 Persen	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Persen	85 Persen	100%
5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80 Orang	80 Orang	100%

5 05	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
5 05 02	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	100%
		Jumlah partai yang dibina dan diberikan bantuan keuangan partai	8 partai politik	8 partai politik	8 partai politik	8 partai politik	8 partai politik	8 partai politik	8 partai politik	100%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%
		Jumlah lembaga atau instansi vertikal yang menerima bantuan hibah	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat		100%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat	55 organisasi masyarakat		100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	100%

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik yang berkembang ditengah masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
'003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	59 Orang	59 Orang	59 Orang	59 Orang	59 Orang	59 Orang	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang di atas dapat dijelaskan bahwa BPBD KESBANGPOL melaksanakan 6 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 98 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,77% program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%;
2. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Persentase Bencana yang Tertangani target kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian 100% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 5 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%. Sementara itu ada 1 (satu) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota realisasinya di bawah 75 % (sub kegiatan ini berupa Kegiatan ini ditujukan untuk membantu Kejadian Pascabencana yang berdampak yang berskala kecil di Kota Padang Panjang Tahun 2023, dalam upaya peningkatan pelayanan pascabencana yang berskala kecil maka BPBD KESBANGPOL membantu berupa bahan bangunan. kegiatan ini telah membantu pascabencana memberi bantuan berupa material/bahan bangunan pada Masyarakat di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan memberi bantuan berupa material/bahan bangunan kepada masyarakat terdampak pascabencana;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Program Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Program Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlakutarget tahun 2023 sebesar 75% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan indikator Program Persentase Konflik yang tertangani target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Program Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah target tahun 2023 sebesar

100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran BPBD KESBANGPOL Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah: BPBD KESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	Perubahan Renstra 2018-2023						
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.663.026.389	4.503.880.942	97.31%	5.065.099.557	5.065.099.557	100%
5 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.822.528.436	3.719.698.684	97.31%	4.245.506.957	4.245.506.957	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.822.528.436	3.719.698.684	97.31%	4.245.506.957	4.245.506.957	100%
5 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				24.000.000	24.000.000	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		24.000.000	24.000.000	100%
5 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	317.379.700	292.945.247		209.950.200	209.950.200	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.803.400	5.737.400	90.25%	3.911.200	3.911.200	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.039.400	15.302.500	80.37%	45.684.200	45.684.200	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.316.900	10.735.000	74.98%	10.364.800	10.364.800	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.220.000	261.670.347	94.05%	149.990.000	149.990.000	100%
5 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.650.000	42.400.000	85.39%	60.378.200	28.707.600	100%
	Pengadaan Mebel				40.871.400	40.871.400	100%
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.650.000	42.400.000	85.39%	21.506.800	21.506.800	100%
5 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.710.204	142.973.206		155.912.000	155.912.000	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.450.000	98.57%	3.432.000	3.432.000	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.498.500	16.416.786	59.70%	28.904.000	28.904.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	Perubahan Renstra 2018-2023						
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.712.500	123.106.420	88.11%	123.576.000	123.576.000	100%
5 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.408.049	305.863.805		367.352.200	367.352.200	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau lapangan	312.388.599	277.373.205	88.79%	316.456.000	316.456.000	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.733.750	16.399.600	66.30%	35.619.700	35.619.700	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.285.700	12.091.000	79.10%	15.276.500	15.276.500	100%
5 01 02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.274.223.434	1.110.737.374		1.593.913.300	1.593.913.300	100%
5 01 02 2.01	Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	37.879.834	33.581.550	88.65%	299.921.200	299.921.200	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				260.000.000	260.000.000	100
5 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana)	37.879.834	33.581.550	88.65%	39.921.200	39.921.200	100%
5 01 02 2.01 0005	Kegiatan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.104.350.600	972.662.574		1.054.869.900	1.054.869.900	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				49.958.100	49.958.100	100%
5 01 02 2.01 0007	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	83.045.300	79.130.225	95.3%	44.293.000	44.293.000	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	958.509.000	887.722.499	92.61%	960.618.800	960.618.800	100%
	Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	62.796.300	5.809.850	9.25%	92.352.200	92.352.200	100%
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	62.796.300	5.809.850	9.25%	92.352.200	92.352.200	100%
5 01 02 2.02	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	131.993.000	104.493.250	79.17	146.770.000	146.770.000	100%
5 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	131.993.000	104.493.250	79.17%	146.770.000	146.770.000	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				762.379.600	762.379.600	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp))	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	Perubahan Renstra 2018-2023						
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				762.379.600	762.379.600	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				762.379.600	762.379.600	100%
5 01 02 2.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7.481.820.357	7.353.906.436.73	94.5%	11.996.392.898	11.996.392.898	100%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	7.481.820.357	7.353.906.436.73	94.5%	11.996.392.898	11.996.392.898	100%
5 01 02 2.03 0003	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.338.000	24.221.050	95.59%			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6.701.693.380	6.662.848.530	99.42%	10.977.504.680	10.977.504.680	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	754.788.977	666.836.856.73	88.35%	1.018.888.218	1.018.888.218	100%
5 01 02 2.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%
5 01 02 2.04 0001	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8 = 7/6
	Perubahan Renstra 2018-2023						
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Asing di Daerah	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%
5 01 03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	100%
5 01 03 2.01	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	100%
5 01 03 2.01 0007	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	100%
5 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%
5 05 02 2.01	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%
5 05 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 7 program , 15 (lima belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan Program, Kegiatan, sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (59.70%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran token listrik, Tagihan telepon, Tagihan TV Berlangganan dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian per bulannya;
- b. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (66,30%). Sub kegiatan ini melakukan Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer, Mesin chainsaw, Genset, CCTV, HT, Radio Pemancar, dan Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Genset dan Pompa Portable. dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan Kebutuhan;
- c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Sub kegiatan ini melakukan Rehab kecil yang terdampak bencana alam dan Makanan dan minuman aktivitas lapangan. dimana pembayaran sesuai dengan kejadian di Lapangan (Insidentil);
- d. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Asing di Daerah (73.5%). Sub kegiatan ini ada Honorarium Tim Pengawasan Ormas, Makanan dan Minuman Rapat Tim rendahnya realisasi karena keterbatasan porsonil yang ada di Bidang Kesbangpol mengakibatkan kurangnya maksimalnya pengawasan kepada ormas tersebut;

Program, Kegiatan, sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, Yaitu :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD KESBANGPOL

Penyelenggaraan pelayanan BPBD, KESBANGPOL adalah melaksanakan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana dan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja BPBD KESBANGPOL.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2023 dengan target sebesar 73%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel T.C 23													
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang													
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisa
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-9	-10			-11	-12	-16	-17	
1	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bencana				4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket			4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket			
2	Pencegahan Dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana				15 org, 160 org	15 org, 160 org			15 org, 160 org	15 org, 160 org			
3	Pendidikan dan Pelatihan				160 org	160 org			160 org	160 org			
4	Simulasi Penanganan Bencana				1.500 org				1.500 org				
5	Operasional Pusdalops				22 org	22 org			22 org	22 org			
6	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana				85 kejadian	80 kejadian			85 kejadian	80 kejadian			
7	Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam				20 jenis				20 jenis				
8	Pengadaan Barang/peralatan penanganan Covid-19				-	-			-	-			
9	Penegakan Disiplin Protokol Covid-19				-	-			-	-			
10	Verifikasi dan Validasi kerusakan				44 Kejadian	42Kejadian			44 Kejadian	42Kejadian			
11	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana				1 dokumen, 40	1 dokumen, 40			1 dokumen, 40	1 dokumen, 40			
12	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)				50 org	50 org			50 org	50 org			
13	Kewaspadaan Dini Daerah				12 kali	12 kali			12 kali	12 kali			
14	Pendidikan wawasan Kebangsaan				50 org	50 org			50 org	50 org			
15	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama				6 kali pertemuan	6 kali pertemuan			6 kali pertemuan	6 kali pertemuan			
16	Pengawasan orang asing NGO dan lembaga asing				11 org /LMM	11 org /LMM			11 org /LMM	11 org /LMM			
17	Pelaksanaan Koordinasi penanganan Konflik Sosial				7 kejadian	6 kejadian			7 kejadian	6 kejadian			
18	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah				7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan			7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan			
19	Pembinaan pengawasan dan pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan				55 Ormas	55 Ormas			55 Ormas	55 Ormas			
20	Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula				100 org	100 org			100 org	100 org			
21	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai				8 parpol	8 parpol			8 parpol	8 parpol			
22	Pemantauan Pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden				-	-			-	-			
23	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/kada				-	3 bln			-	3 bln			

Adapun hasil analisis dari pencapaian Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2023 ditargetkan dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya manajemen penanggulangan bencana dan meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik yang merupakan wujud pencapaian visi, misi serta program kerja Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2018-2023 target Tujuan dan Sasaran BPBD KESBANGPOL tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan BPBD KESBANGPOL

- a. "Meningkatkan manajemen Penanggulanagn bencana" Meningkatkan manajemen Penanggulanagn bencana" memiliki indikator kinerja yaitu : Indikator Kinerja Presentase Penanganan Bencana yang tertangani sesuai SOP;
- b. "Terwujudnya Stabilitas Daerah" Terwujudnya Stabilitas Daerah memiliki indikator kinerja yaitu:Indikator Kinerja Angka Kejadian Gangguan Stabilitas Daerah

2. Sasaran BPBD KESBANGPOL adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan meningkatnya respon penanganan, dengan Indikator "Respon tanggap darurat, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja". Pada tahun 2023 adalah sebesar 100%;
- b. Meningkatkan Kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat, dengan Indikator "Angka kejadian konflik sosial ".Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPBD KESBANGPOL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanggulamngan bencana dan kesatuan bangsa dan politik disadari bahwa BPBD KESBANGPOL belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 8 Menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan

- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Dan dalam fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, BPBD KESBANGPOL berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota; dan
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD KESBANGPOL, terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan wewenang seperti yang yang diamanatkan Undang-undang dan Permendagri tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah sebagai berikut

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD KESBANGPOL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana;
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan;
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana;
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana;
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan;
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang;
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang;
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara.

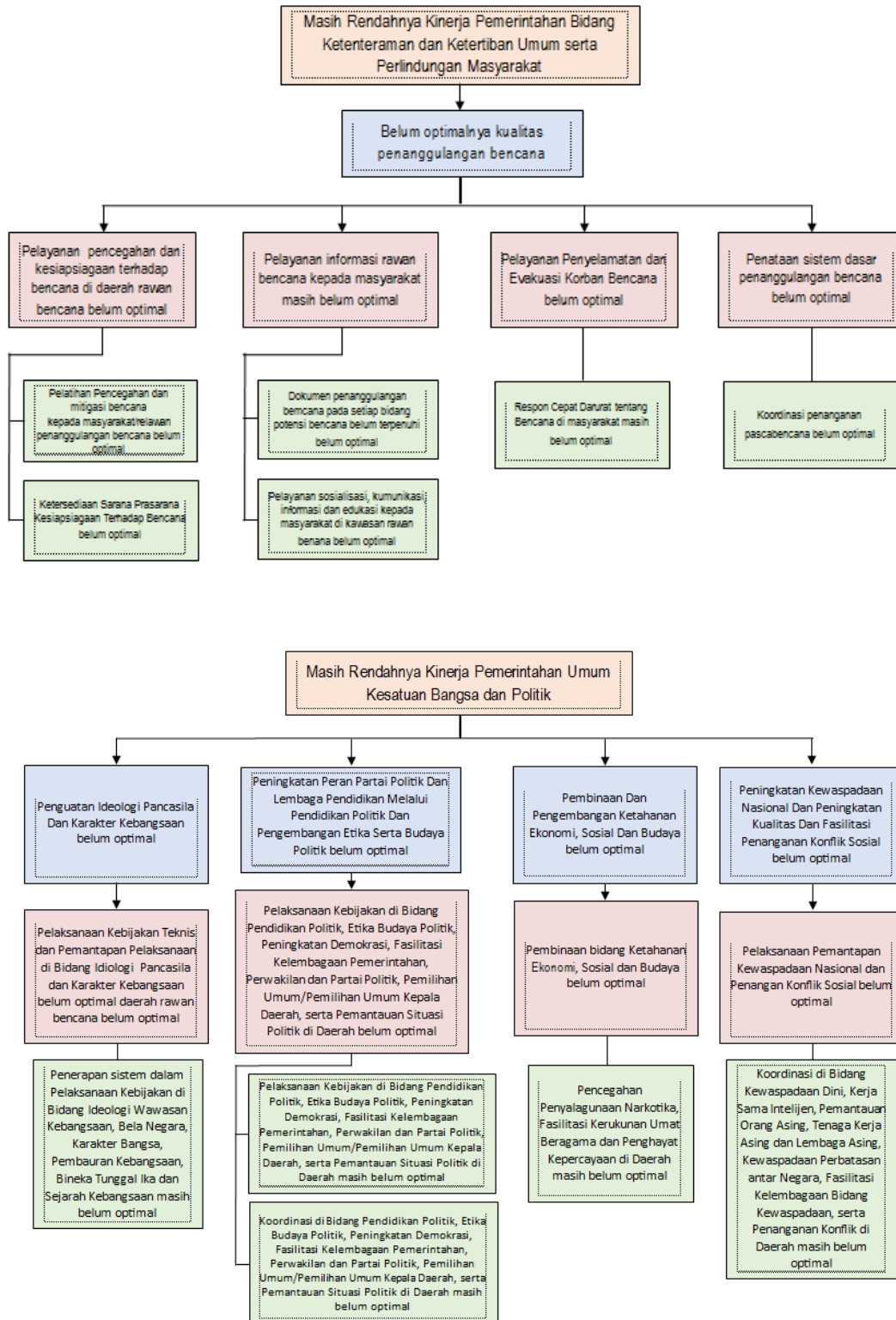
Belum terlaksananya tugas dan fungsi BPBD KESBANGPOL secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat masih belum optimal	Dokumen penanggulangan bencana pada setiap bidang potensi bencana belum terpenuhi	
			Pelayanan sosialisasi , komunikasi , informasi dan edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan bencana belum optimal	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan bencana belum optimal	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat/relawan penanggulangan bencana belum optimal	
			Ketersediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana belum optimal	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	Respon Cepat Darurat tentang Bencana di masyarakat masih belum optimal	
		Penataan sistem dasar penanggulangan bencana belum optimal	Koordinasi penanganan pascabencana belum optimal	
2.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan belum optimal	pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan belum optimal	Penerapan sistem dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan masih belum optimal	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik belum optimal	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah belum optimal	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah masih belum optimal Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah masih belum optimal	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya belum optimal	Pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya belum optimal	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah masih belum optimal	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial belum optimal	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial belum optimal	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah masih belum optimal	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
BPBD, KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD KESBANGPOL adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan rewiu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD KESBANGPOL selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana;

2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD KESBANGPOL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana;
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan;
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana;
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana;
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan;
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang;
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang;
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BPBD KESBANGPOL disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja BPBD KESBANGPOL dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK				8.176.689.995					8.182.482.589	-5.792.594	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR				8.176.689.995					8.182.482.589	-5.792.594	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.176.689.995					8.182.482.589	-5.792.594	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik	100%	5.162.290.105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	4.697.290.105	465.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.281.750.289	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.816.750.289	465.000.000	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	4.281.750.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	3.816.750.289	465.000.000	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	33.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	-	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	33.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	367.873.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	257.333.900	110.540.000	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.805.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.805.600	-	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.892.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.466.400	-	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.494.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.495.000	-	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	300.681.050	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	195.567.000	-	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	80.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	88.495.600	-8.495.600	
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	20 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	50.495.600	-	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	38.000.000	-	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	178.856.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	162.847.816	16.008.284	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.496.500	-	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	34.998.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	34.997.716	-	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.357.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	124.353.600	-	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100%	371.840.753	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100%	371.862.500	-21.747	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	339.238.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	339.238.800	-	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17.310.133	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	17.333.800	-	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.291.820	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.289.900	-	
5.01.02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Padang Panjang	Persentase Warga yang mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1.288.440.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Padang Panjang	Persentase Warga yang mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1.595.301.900	-306.861.900	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100%	50.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100%	155.078.000	-	
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	105.708.000	-	
1.05.03.2.01.0003	Sosialisasi, Komunitas, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara Termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal selama 1 tahun	160 Orang	50.000.000	Sosialisasi, Komunitas, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara Termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal selama 1 tahun	160 Orang	50.000.000	-	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase kesiapsiagaan Masyarakat terhadap risiko bencana	100%	1.052.440.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase kesiapsiagaan Masyarakat terhadap risiko bencana	100%	1.287.440.000	-235.000.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	105 unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	105 unit	30.000.000	-	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	175 Orang	120.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	175 Orang	120.000.000		
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasional dan Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	872.440.000	Pengendalian Operasional dan Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	872.440.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1.05.03.2.02.0006	Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitas dalam pencegahan dan kesiap siagaan bencana	1 Kawasan	20.000.000	Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitas dalam pencegahan dan kesiap siagaan bencana	1 Kawasan			
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	JUmlah Dokumen rencana penanggulangan Bencan (RPB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah legal	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	JUmlah Dokumen rencana penanggulangan Bencan (RPB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah legal	1 dokumen	265.000.000		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90.000.000	-	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	90.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	90.000.000	-	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase Jumlah Kerusakan yang tertangani	1 Dokumen	96.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Padang Panjang	Persentase Jumlah Kerusakan yang tertangani	1 Dokumen	62.783.900	(32.216.100)	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan pemamfaatan system informasi dan kebencanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	53.480.000	Pengelolaan dan pemamfaatan system informasi dan kebencanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen			
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten kota	Kota Padang Panjang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	42.520.000	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten kota	Kota Padang Panjang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	62.783.900		
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Padang Panjang	Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80%	605.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Padang Panjang	Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80%	605.000.000	-	
8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar ideologi dan isu-isu di daerah	80%	605.000.000	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar ideologi dan isu-isu di daerah	80%	605.000.000	-	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	80 orang	605.000.0000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	80 orang	605.000.000	-	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Padang Panjang	Persentase peningkatan stabilitas daerah	100%	1.072.140.600	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Padang Panjang	Persentase peningkatan stabilitas daerah	100%	1.003.084.000	69.056.600	
8.01.032.01	Perumusan kebijakan teknis pematapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan dmokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang sesuai dengan etika dan budaya	23%	1.072.140.600	Perumusan kebijakan teknis pematapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan dmokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang sesuai dengan etika dan budaya	23%	1.003.084.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	kepala daerah serta pemantauan situasi politik					politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	45 orang 8 partai politik	600.000.0000	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	45 orang 8 partai politik	600.000.000	-	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasidi bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	15 orang 2 lembaga	403.084.0000	Pelaksanaan koordinasidi bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	15 orang 2 lembaga	403.084.000		
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	1 laporan	69.056.600	Pelaksanaan monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelmagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	1 laporan			
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap aktifitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100%	50.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan terhadap aktifitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100%	81.806.584	31.806.584-	
8.01.04.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 organisasi masyarakat	50.000.000	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 organisasi masyarakat	81.806.584	-	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	80 orang	50.000.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	80 orang	81.806.584	-	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Padang Panjang	Persentase konflik yang tertangani	100%	175.900.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Padang Panjang	Persentase konflik yang tertangani	100%	100.000.000	-75.900.000-	
8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial,dan budaya	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100%	175.900.000	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial,sosial,dan budaya	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan Masyarakat	100%	100.000.000	-	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakn dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	135.000.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakn dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	100.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	40.900.000	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang			
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Padang Panjang	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%	555.750.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Padang Panjang	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%	100.000.000	-	
8.01.06.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan konflik yang berkembang ditengah Masyarakat	100%	555.750.000	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Padang Panjang	Persentase pencegahan konflik yang berkembang ditengah masyarakat	100%	100.000.000	-	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakn dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	55.750.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakn dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	100.000.000		
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	500.000.000	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	-	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPBD KESBANGPOL dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun BPBD KESBANGPOL juga memiliki tanggung jawab dalam mengakomodir usulan-usulan tersebut dalam Anggaran BPBD KESBANGPOL

Pada Musrenbang RKPD Tahun 2025 ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPBD KESBANGPOL selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPBD KESBANGPOL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga

hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. (menunggu finalisasi RKP 2025)

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan

Misi	Tujuan	Sasaran
Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah		kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang Sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan public

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	Utama	Utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan Akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan Ketimpangan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, BPBD KESBANGPOL berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 2 (dua), yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel”**, Indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai SAKIP.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis perencanaan, BPBD, KESABANGPOL Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dalam penyusunan Renstra dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

2. Telaahan Renstra BPBD Propinsi Sumatera Barat

Pada Renstra BPBD Propinsi Sumatera Barat Sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah tercantum arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu "*Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana*". Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, salah satu tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 adalah menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.

BPBD Provinsi Sumatera Barat juga berfungsi melakukan :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah kondisi geografis Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan angin puting beliung yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana sehingga dibutuhkan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir. Mengingat penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat holistik dan pentahelix, lintas sektor dan wilayah, maka pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya keterlibatan penuh dan sinergis dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

Tabel 3.3
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BPBD KESBANGPOL Sumbar Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut : - Belum terciptanya keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana. - Masih rendahnya kualitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana. - Belum maksimalnya ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan - Belum tersedianya dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana - Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan - Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang - Belum optimalnya penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang - Menurunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara	Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD KESBANGPOL Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama tiga tahun kedepan (2024-2026) adalah sebagai berikut : - Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana. - Meningkatkan kualitas aparatur BPBD KESBANGPOL dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana - Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan - Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana - Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana - Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan - Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang

No.	Permasalahan	Isu Strategis
		8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang
		9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD KESBANGPOL yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD KESABANGPOL Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan kesatuan bangsa politik.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BPBD KESBANGPOL Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	9
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum					
			Respon time Tanggap Darurat	6 menit	5 menit	5 menit
			Persentase gangguan/konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPBD KESBANGPOL Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra BPBD KESBANGPOL Tahun 2024- 2026.

3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BPBD KESBANGPOL sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan BPBD KESBANGPOL
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD KESBANGPOL Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana
 2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
 - 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
 - b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 1) Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

BPBD KESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK					8.182.482.589				8.393.816.783
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.182.482.589				8.393.816.783
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					8.182.482.589				8.393.816.783
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kota Padang Panjang	100,00%	6.292.592.005			100,00%	6.065.732.783
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	4.697.290.105	DAU		100%	4.451.632.295
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	518 Orang/bulan	3.816.750.289	DAU		518 Orang/bulan	3.483.076.982
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang	100%	257.333.900	DAU		100%	229.951.380
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	5.805.500	DAU		4 Paket	7.160.780
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	40.466.400	DAU		4 Paket	22.348.700
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.495.000	DAU		12 Paket	12.901.900
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	150 Laporan	195.567.000	DAU		34 Laporan	187.540.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan	Kota Padang	100%	88.495.600	DAU		100%	140.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah	Perencanaan	Panjang						
1.05.01.2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	5 uni	50.495.600	DAU		40 unit	70.000.000
1.05.01.2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	3 unit	38.000.000	DAU		4 Unit	70.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Padang Panjang	100%	162.847.816	DAU		100%	181.976.470
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.496.500	DAU		12 Laporan	4.950.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	34.997.716	DAU		24 Laporan	32.299.080
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Laporan	124.353.600	DAU		12 Laporan	144.727.390
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang	100%	371.862.500	DAU		100%	416.627.463
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	20 Unit	339.238.800	DAU		20 Unit	373.025.510
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 Unit	17.333.800	DAU		6 Unit	23.310.1333
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	15.289.900	DAU		1 Unit	20.291.820
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BNECANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan	Kota Padang Panjang	100%	1.595.301.900			100 %	1.614.100.488
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang mendapatkan pelauanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kota Padang Panjang	100 %	155.078.000	PAD		100 %	155.078.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terhadap bencana							
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	160 orang	50.000.000	PAD		-	50.000.000
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dinyatakan sah dan legal	Kota Padang Panjang	1 dokumen	105.078.000	PAD		1 Dokumen	105.078.000
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	160 orang	1.287.440.000	PAD		198 orang	1.287.440.000
1.05.03.2.02..0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kawasan tempat tinggal	Kota Padang Panjang	15 unit	30.000.000	PAD		1 unit	30.000.000
1.05.03.2.02..0026	Pengendalian operasi penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal	Kota Padang Panjang	12 laporan	872.440.000	PAD			872.440.000
1.05.03.2.02..0027	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten kota	Jumlah laporan layanan pusat jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dinyatakan sah dan legal	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	265.000.000	PAD			265.000.000
1.05.03.2.02..0028	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten /kota yang mengikurti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Padang Panjang	22 kawasan	120.000.000	PAD			120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	100 %	90.000.000	PAD		100 %	100.000.000
1.05.03.2.03.0002	Resppon cepat darurat bencana kabupaten /kota	Jumlah dokumen sk penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil laporan kaji cepat	Kota Padang Panjang	1 dokumen	90.000.000	PAD		1 dokume	100.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen yang disusun	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	62.783.900	PAD		-	71.582.488
1.05.03.2.04.0010	Pengelolaan Data dalam Sistem koordinasi penanggulangan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor	Kota Padang Panjang	1 kegiatan	62.783.900	PAD		1 Dokumen	71.582.488
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.889.890.584				2.293.084.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANG SAAN	Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kota Padang Panjang	80%	605.000.000			80%	605.000.000
8.01.02 2.01	Perumusan kebijakn teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	Kota Padang Panjang	80%	605.000.000	PAD		80%	605.000.000
8.01.02 2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang ideolgi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa pembauran kebangsaan bineka tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelkasanaan kebijakan dibidang ideolgi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa pembauran kebangsaan bineka tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	80 orang	605.000.000	PAD		80 orang	605.000.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan stabilitas daerah	Kota Padang Panjang	100%	1.003.084.000			80%	1.003.084.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02 3.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	Kota Padang Panjang	23%	1.003.084.000	PAD		23%	1.003.084.000
8.01.02 3.01.003	Pelaksanaan kebijakan di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik	Kota Padang Panjang	45 Orang	600.000.000			45 Orang	600.000.000
8.01.02 3.01.003	Pelaksanaan koordinasi penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik	Kota Padang Panjang	15 orang	403.084.000			15 orang	403.084.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	Kota Padang Panjang	100%	81.806.584			100%	50.000.000
8.01.04.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi Masyarakat yang diperdayakan dan diawasi	Kota Padang Panjang	55 ormas	81.806.584	PAD		80%	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sangketa ormas pengawasan ormas.	Kota Padang Panjang	55 orang	81.806.584	PAD		55 orang	50.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase konflik tertangani	Kota Padang Panjang	100%	100.000.000			100%	135.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	Kota Padang Panjang	100%	100.000.000	PAD		100%	135.000.000
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikjuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahan ekonomi sosial budaya da fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Padang Panjang	43 orang	100.000.000	PAD		43 orang	135.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perpersentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daedrah	Kota Padang Panjang	100%	100.000.000			100%	500.000.000
8.01.06.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	Kota Padang Panjang	100%	100.000.000	PAD		100%	500.000.000
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja dan Lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi bidang kewaspadaan	Jumlah orang yang mengikjuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja dan Lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi bidang kewaspadaan	Kota Padang Panjang	59 orang	100.000.000	PAD		43 orang	500.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KESBANGPOL

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPBD KESBANGPOL sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- b. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
- c. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum BPBD KESBANGPOL bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BPBD KESABANGPOL sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bbangsa dan Pilitik Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Matriks Renja SIPD RI)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK						8.182.482.589,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.325.742.005,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.325.742.005,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.730.440.105,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen			-	3.816.750.289,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1470 Orang/bulan			518 Orang/bulan	3.816.750.289,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	490 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 persen			-	33.150.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAEKAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	105 Paket			35 Paket	33.150.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	35 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	90 persen			-	257.333.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	90 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	5.805.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	40.466.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			2 Paket	15.495.000,00	Kota Padang Parjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	12 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan			150 Laporan	195.567.000,00	Kota Padang Parjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	34 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit			3 Unit	38.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90 persen			-	162.847.816,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	90 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			3 Laporan	3.496.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan			36 Laporan	34.997.716,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	24 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			4 Laporan	124.353.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90 persen			-	371.862.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	90 persen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit			20 Unit	339.238.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	20 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit			1 Unit	17.333.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	6 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	15.289.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengga raan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Hamonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	1.595.301.900,00						-	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %			-	155.078.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengga raan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Hamonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1.05.03.2.01.0007		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				160 Orang	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	105.078.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	398 orang			-	1.287.440.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	198 orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit			15 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	872.440.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja p enyelenggaraa n pemer intahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	265.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja p enyelenggaraa n pemer intahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				22 Kawasan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 %			-	90.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REFAKSI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen			1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	25 kerusakan			-	62.783.900,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	25 kerusakan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Dokumen			1 Kegiatan	62.783.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						1.856.740.584,00							0,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						1.856.740.584,00							0,00	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	605.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	80 %			-	605.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	80 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang			80 Orang	605.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	80 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	1.003.084.000,00						-	0,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	23 %			-	1.003.084.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	23 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 Orang			45 Orang	600.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	8 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang			15 Orang	403.084.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	48.656.584,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	55 ormas			-	48.656.584,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	55 ormas	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Orang			55 Orang	48.656.584,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	65 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	100 %			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Orang			43 Orang	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	100 %			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Orang			59 Orang	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	J U M L A H							8.182.482.589,00								0,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja BPBD KESABANGPOL merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja BPBD KESABANGPOL disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja BPBD KESABANGPOL yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja BPBD KESABANGPOL Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja BPBD KESABANGPOL sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada BPBD KESABANGPOL Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang, Juli 2024

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang**



I PUTU VENDA, S.STP.M.Si

NIP. 19770522 199511 1001